Jurnal REP Vol 5/ No.2/2020

Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)

http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP

P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205

PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

THE EFFECT OF PAD AND BALANCING FUND ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE DAN PUBLIC WEFARE IN CENTRAL JAVA

DOI: 10.31002/rep.v5i2.2202

Nuwun Priyono[1], Ari Nurul Fatimah[2]✉, Yulida Army Nurcahya[3]

[1,2,3]Universitas Tidar

✉ ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu membuktikan seberapa besar pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap kinerja keuangan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil sebanyak 31 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan model regresi linear berganda. Dalam penelitian ini variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil penelitian menunjukan bahwa DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, kinerja keuangan

Abstract

This study examined the effect of PAD and balance funds on regional financial performance and community welfare in districts / cities in Central Java. The purpose of this study was to prove how much effect the PAD, DBH, DAU and DAK had on regional financial performance and the level of community welfare in districts / cities in Central Java, both partially and simultaneously. The data used in this research was secondary data. The sampling technique used purposive sampling which was the technique of determining the sample with certain considerations. Samples were taken as many as 31 districts / cities in Central Java. The research method used causality research with multiple linear regression models. In this study, the independent variable affects the dependent variable. The results showed that DAU, and DAK partially effected regional financial performance, while PAD, DBH, DAU, and DAK simultaneously affected regional financial performance. The results of other studies indicate that partially there were only two variables PAD and DAU that affect the level of community welfare. Besides that simultaneously PAD, DBH, DAU and DAK variables affect the level of community welfare.

Keywords: PAD, DAU, DAK, financial performance

© 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah sudah diimplementasikan hampir mendekati 20 tahun. Otonomi daerah sudah dimulai sejak adanya paket undang-undang otonomi daerah yaitu: Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dengan digulirkannya kedua paket undang-undang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memasuki babak baru dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Sistem pemerintahan berubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi (otonomi daerah). Perjalanan implementasi sistem otonomi daerah yang ditandai dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang merubah sebagian besar aspek pengelolaan keuangan negara, terutama keuangan pemerintah daerah.

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi menaruh harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan pemerintahan yang terdesentralisasi atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka akan dapat terdistribusi kewenangan pengelolaan pemerintahan dari pusat kepada daerah.

Salah satu aspek pengelolaan pemerintahan yaitu aspek keuangan. Pengelolaaan keuangan yang terdesentralisi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal akan dapat mengurangi kesenjangan/ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkan secara horizontal akan mengurangi ketimpangan keuangan antar pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya. Pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi menuntut adanya peningkatan kinerja keuangan daerah. Daerah dituntut untuk dapat mencapai target berupa output yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan kinerja keuangaan daerah yang baik dan optimal maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan dari segi jumlah rupiahnya. Akan tetapi apakah kenaikan penerimaan keuangan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan dapat berimbas pada peningkatan kinerja keuangan daerah maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini akan mengkaji dan membuktikan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Asli Umum (DAU) dan Dana Asli Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan otonomi daerah yang

dilaksanakan berjalan dengan baik. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistyorini, 2004).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bagian daerah meliputi pajak dan sumber daya alam (bukan pajak). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH bukan pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Wandira, 2013).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Bratakusumah & Solihin, 2004 (dalam Adiputra dkk, 2015) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memerhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah agar kesenjangan pendapatan antar daerah dapat diperkecil. Selain itu DAU merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Perdirjen Perimbangan Keuangan No: 4/PK/2020).

Menurut Kuncoro (2004) DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 27, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal alokasi dasar.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang telah ditetapkan pada APBN. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tiga kriteria dalam penentuan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria untuk pengadaan barang-barang investasi atau fasilitas-fasilitas tertentu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan bahwa penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Rasio efisiensi

keuangan daerah sebagai salah satu pengukuran kinerja keuangan daerah. Menurut Halim (2007), Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2002). Penghitungan rasio efisiensi yaitu:

Rasio Efisiensi: (Rasio Pengeluaran/Rasio Penerimaan) x 100%.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan oleh besar kecilnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebuah daerah dikatakan berhasil jika kesejahteraan masyarakat daerahnya meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui sumber-sumber penerimaan keuangan daerah seperti: PAD, DBH, DAU dan DAK.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika masyarakat mampu memperoleh haknya seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut, *United Nations Development Programe* (UNDP) pada tahun 1990 menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti tingkat harapan hidup (*life expectancy at age*), tingkat melek huruf masyarakat (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*men years of schooling*), serta tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing (*purchasing power parity*). Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah "suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia". Indikator kesejahteraan manusia yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusia-nya tinggi, demikian sebaliknya (Saputra, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (Marhaeni, et al., 2008).

Kemudian menurut Kuncoro (2003) penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-1,0 yang terdiri dari:

Kategori rendah : nilai IPM 0-0,5
Kategori menegah : nilai IPM antara 0,51-0,79
Kategori tinggi : nilai IPM 0,8-1,0

Menurut BPS (2012) menyebutkan bahwa konsep Indeks Pembangunan Manusia yang berskala internasional, menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :

Tinggi : IPM ≥ 80,0
Menengah Atas : 66,0 ≤ IPM ≤ 80,0
Menengah Bawah : 50,0 ≤ IPM ≤ 66
Rendah : IPM ≤ 50,0

Hasil penelitian Adiputra dkk (2015) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja daerah kabupaten/kota di Bali. Sedangkan SiLPA melalui alokasi belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas

pembangunan manusia pada daerah kabupaten/kota di Bali. Sementara itu DAU, DAK dan DBH belum mampu mempengaruhi kualitas pembangunan manusia karena tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai belanja modal. Penelitan lain oleh Harahap (2011), mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap IPM (Indeks Persepsi Manusia) menunjukkan hasil bahwa pengujian secara simultan membuktikan bahwa DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM. Penelitian oleh Julitawati, dkk (2012) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan data *time series* yaitu periode tahun 2015-2018. Data yang digunakan sejumlah 35 yang terdiri dari Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa tengah selama 2014-2018. Adapun data yang diperoleh yaitu berupa data laporan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Dari data ini akan diperoleh data mengenai PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, DAK dan rasio kinerja keuangan daerah. Kemudian data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003). Dalam penelitian ini penelitianpertimbangan tertentu karena adanya keterbatasan tersedianya data

Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi pustaka yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi yang masih relevan dalam penelitian ini. Selain itu data juga diunduh melalui internet dan didapat langsung dari kantor/instansi yang berkaitan dalam penelitian ini. Data mengenai mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didapat langsung dari BPS Propinsi Jawa Tengah. Data laporan realisasi APBD didapat dari Direktorat jenderal perimbangan keuangan. Selain itu data diperoleh melalui *website* berikut ini: www.djpk.kemenkeu.go.id, dan www.bps.go.id.

Indikator Yang Diamati

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat Kesejahteraan masyarakat dalam variabel ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel independen dalam penelitian ini adalah: PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan DAK. Kinerja keuangan pemerintah daerah akan diukur dengan menghitung rasio efisiensi keuangan daerah dengan membandingkan total realisasi pengeluaran dibagi total realisasi penerimaan, diukur dalam persentase. PAD, DAU dan DAK akan diukur dengan satuan rupiah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, diukur dalam satuan rupiah.Dana bagi hasil, DAU dan DAK merupakan komponen dana perimbangan.

Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa besar variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik yang digunakan dalam analisis regresi ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil/ *ordinary least squares* (Gujarati, 2003). Persamaan regresinya adalah:

$$\mathbf{Y1_{it} = \alpha + \alpha_i + X_{it}ß + e_{it}}$$

dimana : $Y1_{it}$ = Kinerja Keuangan Daerah, α = Konstanta, β = Slope atau koefisien regresi atau intersep, X_{it} = observasi ke -it dari variabel bebas , e = error.

$$\mathbf{Y2_{it} = \alpha + \alpha_i + X_{it}ß + e_{it}}$$

dimana : $\mathbf{Y2_{it}}$ = Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, α = Konstanta, β = Slope atau koefisien regresi atau intersep, X_{it} = observasi ke -it dari variabel bebas , e = error.

Persamaan regresi linier berganda dalam model penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan menggunakan *software* pengolahan data SPSS. Sebelum dilakukan pengujian terhadap regresi linear berganda tersebut dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik yang dilakukan yang tersebut diatas harus menunjukan hasil normalitas, bebas dari multikoliniearitas, bebas dari autokorelasi dan bebas dari heterokesdasitas (Ghozali, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen Kinerja Keuangan Daerah (KKD)

Dalam penelitian ini terdapat dua formula regresi liniear berganda yaitu: Kinerja Keuangan Daerah (KKD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai dependen (variabel terikat). Sedangkan variabel independen atau variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel bebas tersebut sama untuk kedua formula regresi liniear berganda tersebut.

Regresi Linier berganda, untuk variabel dependen KKD dengan formula:

$$\mathbf{KKD = \alpha + ß_1X_1 + ß_2\ X_2 + ß_3\ X_3 + ß_4\ X_4 + e}$$

Tabel 1. Uji Heterokesdasitas

Uji Heterokesdasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21,511	9,816		2,191	,030
PAD	-,132	,318	-,043	-,417	,677
DBH	-,157	,278	-,063	-,566	,572
DAU	-1,070	,445	-,289	-2,407	,018
DAK	,498	,165	,328	3,019	,003

Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH

Uji heterokesdasitas adalah bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006).

Berdasarkan tabel 1 di atas, koefisien parameter untuk variable independent PAD, DBH, dan DAU tidak signifikan pada 0,01 yang berarti tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan variable DAK ternyata secara statistik pada 0,01 yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

Uji Multikoliniearitas

Tabel 2. Uji Multikoliniearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	0,711	1,407
	DBH	0,603	1,659
	DAU	0,525	1,906
	DAK	0,640	1,562

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Adanya multikolinearitas atau korelasi tinggi antar *variable independent* dapat dideteksi salah satunya dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*

(VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah tolerance<0,10 atau sama dengan VIF>10.

Berdasarkan table 2 di atas, nilai *tolerance* berkisar antara 0,525 sampai 0,711. Hal tersebut berarti tidak ada nilai *tolerance* yang di bawah 0,10. Nilai VIF berkisar 1,407 sampai 1,906. Hal tersebut nilai VIF tidak ada yang lebih dari 10. Nilai keduanya menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar *variable independent*.

Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Uji asumsi klasik akan dilakukan pada Regresi Linier berganda, untuk variabel dependen IPM dengan formula:

$$IPM = \alpha + ß_1 X_1 + ß_2 X_2 + ß_3 X_3 + ß_4 X_4 + e$$

Uji Heterokesdasitas

Tabel 3. Uji Heterokesdasitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,296	,353		14,986	,000
	PAD	,083	,011	,560	7,278	,000
	DBH	,014	,010	,118	1,417	,159
	DAU	-,130	,016	-,730	-8,150	,000
	DAK	,001	,006	,011	,132	,895

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan tabel 3 di atas, koefisien parameter untuk variabel independen DBH dan DAK tidak signifikan pada 0,01 yang berarti tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan variabel PAD dan DAU ternyata secara statistik pada 0,01 yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

Uji Multikoliniearitas

Tabel 4. Uji Multikoliniearitas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,296	,353		14,986	,000		
	PAD	,083	,011	,560	7,278	,000	,711	1,407
	DBH	,014	,010	,118	1,417	,159	,603	1,659
	DAU	-,130	,016	-,730	-8,150	,000	,525	1,906
	DAK	,001	,006	,011	,132	,895	,640	1,562

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai tolerance berkisar antara 0,525 sampai 0,711. Hal tersebut berarti tidak ada nilai tolerance yang di bawah 0,10. Nilai VIF berkisar 1,407 sampai 1,906. Hal tersebut nilai VIF tidak ada yang lebih dari 10. Nilai keduanya menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar *variable independent.*

Analisis Regresi Liniear dengan Variabel Dependen Kinerja Keuangan Daerah (KKD)

Uji asumsi klasik terhadap model regresi linier yang telah dilakukan tidak ditemukan masalah dalam multikolinieritas, dan heterokesdasitas. Langkah selanjutnya dapat dilakukan pengujian secara simultan dan parsial. Pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F, sedangkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t. Pengujian parsial dan simultan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (software) pengolah data SPSS versi 20.

Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,511	9,816		2,191	,030
	PAD	-,132	,318	-,043	-,417	,677
	DBH	-,157	,278	-,063	-,566	,572
	DAU	-1,070	,445	-,289	-2,407	,018
	DAK	,498	,165	,328	3,019	,003

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Uji statistik t bertujuan untuk mengintepretasikan koefisien parameter *variable independent*. Variabel dikatakan signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi di bawah 0,05. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel DAU dan DAK signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Hal tersebut terjadi karena nilai variable DAU yaitu 0,018 dan nilai variable DAK 0,003. Kedua nilai variable tersebut berada di bawah 0,05. Variable PAD dan DBH berada jauh di atas 0,05 yaitu nilai PAD sebesar 0,677 dan nilai DBH sebesar 0,572. Oleh karena itu, variabel PAD dan DBH tidak signifkan terhadap variable kinerja keuangan daerah.

Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji secara simultan pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,233	4	5,058	3,262	,014[b]
	Residual	184,502	119	1,550		
	Total	204,736	123			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah
b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua *variable independent* yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah variable dependen secara linier berhubungan dengan variable independent.

Berdasarkan tabel 6 tersebut diatas yang dapat dilhat dari tabel ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 3,262 dengan probabilitas 0,014. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel independen tidak sama dengan nol. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel independen DAK, PAD, DBH, dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Koefisien determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,314[a]	0,099	0,069	1,24517

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independent dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

Dalam penelitian ini, R square mempunyai nilai 0,099 yang berarti variable-variabel independent memberikan informasi yang dibutuhkan oleh variable dependen. Hal ini berarti 9,9% variasi kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variable DAK, PAD, DBH, dan DAU. Sedangkan sisanya 90,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Standard error of estimate (SEE) menunjukkan angka sebesar 1,24517. Semakin kecil nilai SEE, maka model regresi akan semakin tepat dalam memprediksi variable dependen.

Analisis Regresi Liniear dengan Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,296	,353		14,986	,000
	PAD	,083	,011	,560	7,278	,000
	DBH	,014	,010	,118	1,417	,159
	DAU	-,130	,016	-,730	-8,150	,000
	DAK	,001	,006	,011	,132	,895

a. Dependent Variable: IPM

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut terjadi karena nilai variabel DAU yaitu 0,00 dan nilai variable PAD 0,000. Kedua nilai variabel tersebut berada di bawah 0,05. Variabel DBH dan DAK berada jauh di atas 0,05 yaitu nilai DBH sebesar 0,159 dan nilai DAK sebesar 0,895. Oleh karena itu, variabel PAD dan DBH tidak signifkan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)

Tabel 9. Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,238	4	,060	29,622	,000[b]
	Residual	,239	119	,002		
	Total	,477	123			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

Berdasarkan tabel 9 uji ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 29,622 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi *variable independent* tidak sama dengan nol. Hal tersebut membuktikan bahwa *variable independent* DAK, PAD, DBH, dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap indeks perkembangan manusia (IPM).

Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Tabel Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706[a]	,499	,482	,04483

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: IPM

Dalam penelitian ini, R square mempunyai nilai 0,499 yang berarti variable-variabel independent memberikan informasi yang dibutuhkan oleh variable dependen. Hal ini berarti 49,9% variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variable DAK, PAD, DBH, dan DAU. Sedangkan sisanya 50,1% dijelaskan oeh sebab-sebab yang lain di luar model. Standard error of estimate (SEE) menunjukkan angka sebesar 0,04483.

Semakin kecil nilai SEE, maka model regresi akan semakin tepat dalam memprediksi variable dependen.

PEMBAHASAN

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah

Beberapa sumber penerimaan keuangan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Sedangkan DBH, DAU dan DAK merupakan sumber penerimaan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasil R square dalam penelitian ini menunjukkan nilai 0,099, artinya bahwa variabel independen seperti: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya dapat menjelaskan sebesar 9,9% dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (KKD) yang telah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah. Sedangkan sebesar 90,1% dipengaruhi dari variabel lain diluar model penelitian. Angka persentase sebesar 9,9% mengindikasikan bahwa variabel kinerja keuangan daerah tidak terlalu signifikan dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut. Kecilnya nilai pengaruh variabel independen pada variabel dependen hanya sebesar 9,9%, menunjukkan bahwa ke empat sumber penerimaan daerah tersebut belum mampu diserap anggarannya untuk program-program pembangunan.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji signifikasi t dan uji signifikansi F. Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui secara parsial variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap varibel KKD. Sedangkan uji signifikansi F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel PAD, DBH, DAU dan DAK secara simultan terhadap variabel KKD.

Uji signifikansi t menunjukkan bahwa variabel DAU dan DAK signifikan terhadap variabel KKD. Hal tersebut terjadi karena nilai variabel DAU yaitu 0,018 dan nilai variabel DAK 0,003. Kedua nilai variable tersebut berada di bawah 0,05. Sedangkan variabel PAD dan DBH berada jauh di atas 0,05 yaitu nilai PAD sebesar 0,677 dan nilai DBH sebesar 0,572. Oleh karena itu, variabel PAD dan DBH tidak signifkan berpengaruh terhadap variabel KKD. Hal ini menunjukan bahwa terdapat dua variabel saja yaitu: DAU dan DAK berpengaruh terhadap KKD. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan. Artinya di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dua sumber dana tersebut mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang tercermin dari rasio efisiensi keuangan daerah. Penggunaan DAU dan DAK telah mempengaruhi efisiensi kinerja keuangan daerah. DAU dan DAK merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga kedua sumber pengeluaran daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dimana semakin tinggi pengeluaran daerah semakin tinggi kinerja keuangan daerahnya. Dua variabel lain yaitu: PAD dan DBH belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Dua variabel ini tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, dikarenakan dua variabel tersebut merupakan bagian sumber penerimaan daerah. Semakin besar penerimaannya yang tidak diimbangi dengan besarnya pengeluaran akan menurunkan kinerja keuangan daerah.

Namun jika dilihat dari hasil uji signifikansi F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,262 dengan probabilitas 0,014. Oleh karena probabilitas lebih kecil

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel independent tidak sama dengan nol. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel independen PAD, DBH, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini bisa diartikan jika keempat variavel independen tersebut bekerja secara bersama-sama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah akan efisien jika besarnya PAD, DBH, DAU dan DAK digunkan secara maksimal dan tepat sasaran dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah.

Sumber-Sumber Keuangan Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Hasil uji regresi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menghasilkan koefisien determinasi yang dapat dilhat dari angka R square mempunyai nilai 0,499 yang berarti variabel-variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 49,9%. Ini berarti bahwa variabel sumber-sumber keuangan daerah seperti: PAD, DBH, DAU dan DAK mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 49,9% terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sumber-sumber penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hamper 50%. Sedangkan sebesar 50,1 % tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian. Angka sebesar 49,9% merupakan angka yang cukup tinggi bagi model penelitian ini, yang berarti bahwa hampir setengah variabel independen (PAD, DBH, DAU dan DAK) dapat menjelaskan terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemudian hasil uji signifikansi t menunjukkan bahwa hanya variabel PAD dan DAU signifikan terhadap variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena nilai signifikansi variabel DAU yaitu 0,00 dan nilai signifikansi variabel PAD 0,000. Kedua nilai variabel tersebut berada di bawah 0,05. Sedangkan nilai signifikansi uji t untuk variable DBH dan DAK berada jauh di atas 0,05 yaitu nilai DBH sebesar 0,159 dan nilai DAK sebesar 0,895. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa PAD yang telah diperoleh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah telah digunakan secara efektif dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah sehingga berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat, telah digunakan secara tepat sehingga dapat mendorong bagi tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa DBH dan DAK belum terlalu maksimal dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. DBH merupakan bagian dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti: dana bagi hasil pajak dan dana bagai hasil bukan pajak (sumber daya alam). Sedangkan DAK merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus. DBH dan DAU merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal daerah. Jika belum mempengaruhi tingkat kesejahteraan

masyarakat, artinya kedua pos tersebut belum optimal dibelanjakan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesejahteraan digunakan uji signifikansi F. Nilai F hitung menunjukkan angka sebesar 29,622 dengan probabilitas 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas lebih kecil dari 0,05. Angka ini menunjukan bahwa secara simultan keempat variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara individual/parsial hanya dua variabel yaitu PAD dan DAU yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, namun jika dilihat dari simultansi keempat variabel dapat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. PAD, DBH, DAU dan DAK jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan tepat dapat mendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji signifikansi pada variabel dependen Kinerja Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel DAU (X_3) dan DAK (X_4) yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (KKD), karena nilai signifikansi jauh dibawah 0,05 atau 5%. Hal ini terjadi karena DAU dan DAK sebagai sumber penerimaan dapat dibelanjakan dengan tepat, sehingga besarnya nilai pengeluaran dua sumber tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sedangkan dua variabel lain seperti: PAD (X_1) dan DBH (X_2) secara parsial tidak berpengaruh ke variabel variabel Kinerja Keuangan Daerah (KKD) karena nilai signifikansinya jauh diatas 5%.
2. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan variabel variabel PAD (X_1),DBH (X_2), DAU (X_3), dan DAK (X_4) berpengaruh terhadap KKD pada pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan nilai F hitung sebesar sebesar 3,262 dengan probabilitas 0,014.
3. Hasil koefisien regresi menunjukkan besarnya R Square adalah 0,099 atau 9,9%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen KKD dipengaruhi oleh variabel PAD (X_1),DBH (X_2), DAU (X_3), dan DAK (X_4) sebesar 9,9%, sedangkan sebesar 90,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain keempat variabel independen tersebut.
4. Hasil uji signifikansi pada variabel dependen Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM) menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel PAD (X_1) dan DAU (X_3) yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel variabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM), karena nilai signifikansi jauh dibawah 0,05 atau 5%. Hal berarti bahwa PAD dan DAU dapat digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah dengan baik sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dua variabel lain seperti: DBH (X_2) dan DAK (X_4) secara parsial tidak berpengaruh ke variabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM) karena nilai signifikansinya jauh diatas 5%.
5. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan variabel variabel PAD (X_1),DBH (X_2), DAU (X_3), dan DAK (X_4) berpengaruh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM) pada pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan nilai F

hitung sebesar sebesar 29,622 dengan probabilitas 0,000.

6. Hasil koefisien regresi menunjukkan besarnya R Square adalah 0,499 atau 49,9%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM) dipengaruhi oleh variabel PAD (X_1), DBH (X_2), DAU (X_3), dan DAK (X_4) sebesar 49,9%, sedangkan sebesar 50,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain keempat variabel independen tersebut.

Saran

1. Penelitian ini menggunakan data time series selama empat tahun dari tahun 2015-2018. Hal ini dikarenakan terbatasnya data dan waktu penelitian. Sebaiknya dipenelitian yang akan datang menggunakan data time series yang lebih panjang, bisa 5 tahun atau 10 tahun, sehingga hasil analisis data akan lebih akurat dan tepat.
2. Perlu peningkatan dan pengelolaan PAD serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih baik lagi sehingga PAD dan DBH dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Pengelolaan PAD dengan cara melakukan usaha yang maksimal bagi daerah dalam meningkatkan pos –pos PAD seperti: Pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah yang lainnya. Sedangkan pengelolaan DBH, harus digunakan seoptimal mungkin pada program-program kesejahteraan masyarakat.
3. Perlu dialokasikan DBH dan DAK yang tepat dan lebih optimal lagi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga sumber dana tersebut dapat digunakan oleh daerah dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah dapat memanfaatkan pengalokasian DAK dan DBH secara tepat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I Made Pradana, et.al. 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali)*. SNA 18. USU. Medan. 16-19 September 2015

BPS. (2012). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*.

Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,* Badan Penerbit UNDIP, Edisi IV, Semarang.

Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Halim, A. (2013). *Akuntasi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Handayani, Kristina. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi*. *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Harahap, Riva Ubar. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara*. Jurnal Riset Akuntnasi dan Bisnis. Vol. 11 No.1/Maret 2011. Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara

Julitawati, dkk . 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syahkuala. Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan,* Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Haryo. 2004. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Disertasi. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik.* Cetakan Pertama. UII Press. *Yogyakarta*.

Mardiasmo. 2002(a). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo.2002(b). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Marhaeni, Harmawanti; Sri Yati dan Bambang Tribudhi M. 2008. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Nuritomo & Rossieta.2014. *Politik Dinasti, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. SNA 17 Universitas Mataram

Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No 4/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan DAU Tahun Anggaran 2020 bagi Daerah yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan dalam rangka penanggulangan COvid 19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saputra, Bambang.2011. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Thesis. Maksi. UII. Yogyakarta.

Sugiyono, 2003, *Statistika Untuk Peneltian*. Cetakan kelima, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009.Metodologi *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*Cetakan kedelapan. Bandung:Alfabeta

Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan". *Jurnal Program* Pascasarjana *Akuntansi, Fakultas Ekonomi*. Universitas Sriwijaya.

Tuasikam, Askal. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara* Pemerintah *Pusat dan Daerah.*

Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*.

Wenny, Cherrya Dhia. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan.* Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol. 2 No. 1 September 2012